



RENJA 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Merangin dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024.

Rencana Kerja DISKOMINFO ini disusun berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) DISKOMINFO Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, dan mengacu kepada RKPD Kab. Merangin tahun 2024, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen DISKOMINFO di dalam Mencapai Sasaran Indikator, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing komponen organisasi dapat berlangsung dalam proses sinergis, integralistik, holistik, koordinatif, dan melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak yang sama.

Rencana Kerja yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Dinas Kominfo harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tahun 2024 merupakan bagian integral dari program pembangunan Pemerintah Kabupaten Merangin yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo untuk 1 (satu) tahun.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Kerja DISKOMINFO Kabupaten Merangin Tahun 2024, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Bangko, 20 Desember 2023

KEPALA DINAS



Ir. M. ARIEF RH, MUM
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19690626 199303 1 005

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR BAGAN | vi |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 98 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 13 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 14 |
| | |
| BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra | 19 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 37 |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... | 40 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 43 |
| | |
| BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 52 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 53 |
| 3.3. Program dan Kegiatan | 56 |

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ERANGKAT DAERAH

4.1 Indikator Kinerja 72
4.2 Lokasi Kegiatan, Kebutuhan Dana Indikatif, Sumber Dana 72

BAB V. PENUTUP..... 79

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) sesuai amanat undang undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemerintah daerah dan undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan nasional. Rencana kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah daerah dan penjabaran dari rencana jangka menengah pemerintah daerah yang lebih dikenal dengan RPJMD. Penjabaran RPJMD harus dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Renstra ini berisi program dan kegiatan serta indikator yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah. Untuk menyusun dan mencapai target tersebut maka dibuat Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Forum Perangkat Daerah untuk di tindak lanjuti ke tingkat musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023, dimana berbagai usulan dari masyarakat dan pemangku kepentingan bersama-sama merencanakan kebijakan program, pendanaan dan target yang ingin dicapai pada Tahun 2024 mendatang.

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang harus disusun dan ditetapkan pada tingkat Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan yang diamanatkan pada pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah

menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin adalah memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat khususnya pada Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika dalam upaya mempercepat proses modernisasi menuju terwujudnya Masyarakat Informasi (Information Society) atau Masyarakat Berbasis Ilmu Pengetahuan (Knowledge Based Society).

Dengan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika ini, sebagai acuan umum tentang arah pembangunan TIK. Rancangan Renja ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2024-2026 Kabupaten Merangin serta memperhatikan Renja Kementerian Komunikasi dan Informatika serta mensinergikan pembangunan TIK di Kabupaten Merangin dengan pembangunan TIK Nasional dan Kabupaten/Kota.

Penyusunan Renja ini dimaksudkan sebagai informasi dan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai bahan kebijakan teknis Dinas Kominfo. Selain itu Renja ini masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut agar skala prioritas setiap program dan kegiatan lebih konkrit.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Merangin melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin menyusun Dokumen Renja.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya Renja ini, diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat berperan secara optimal memberikan pelayanan publik di bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat di Kabupaten Merangin.

1.1.1. Pengertian Renja

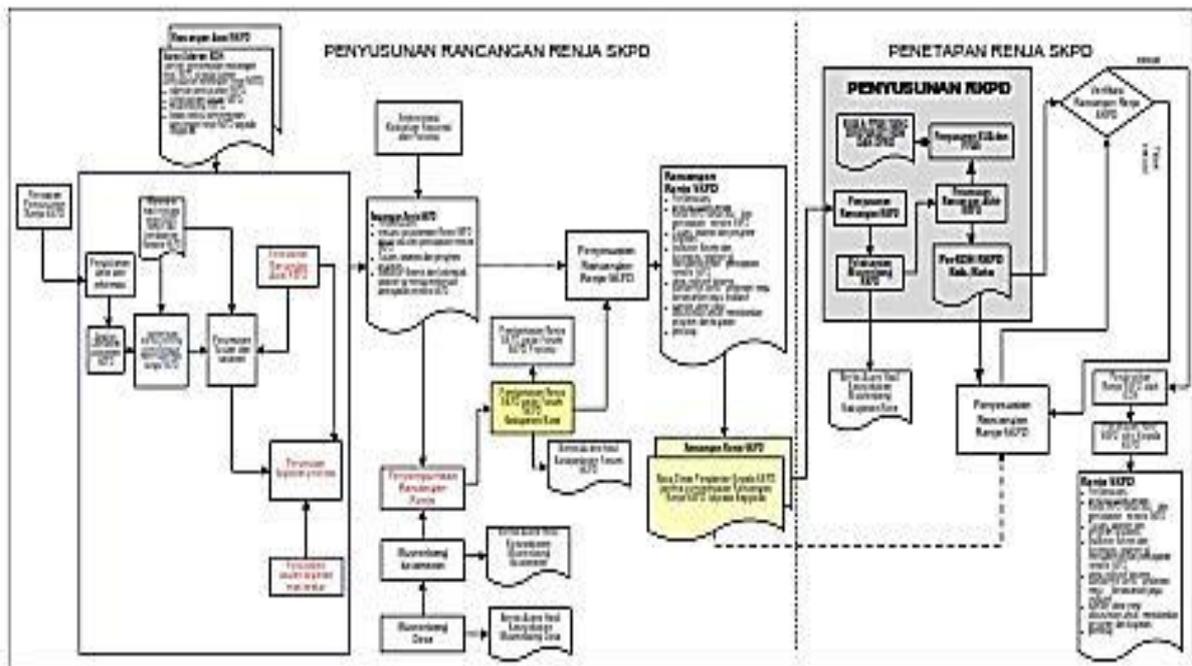
Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin merupakan Perangkat Daerah di Kabupaten Merangin yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Daerah. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja Perangkat Daerah menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja DISKOMINFO

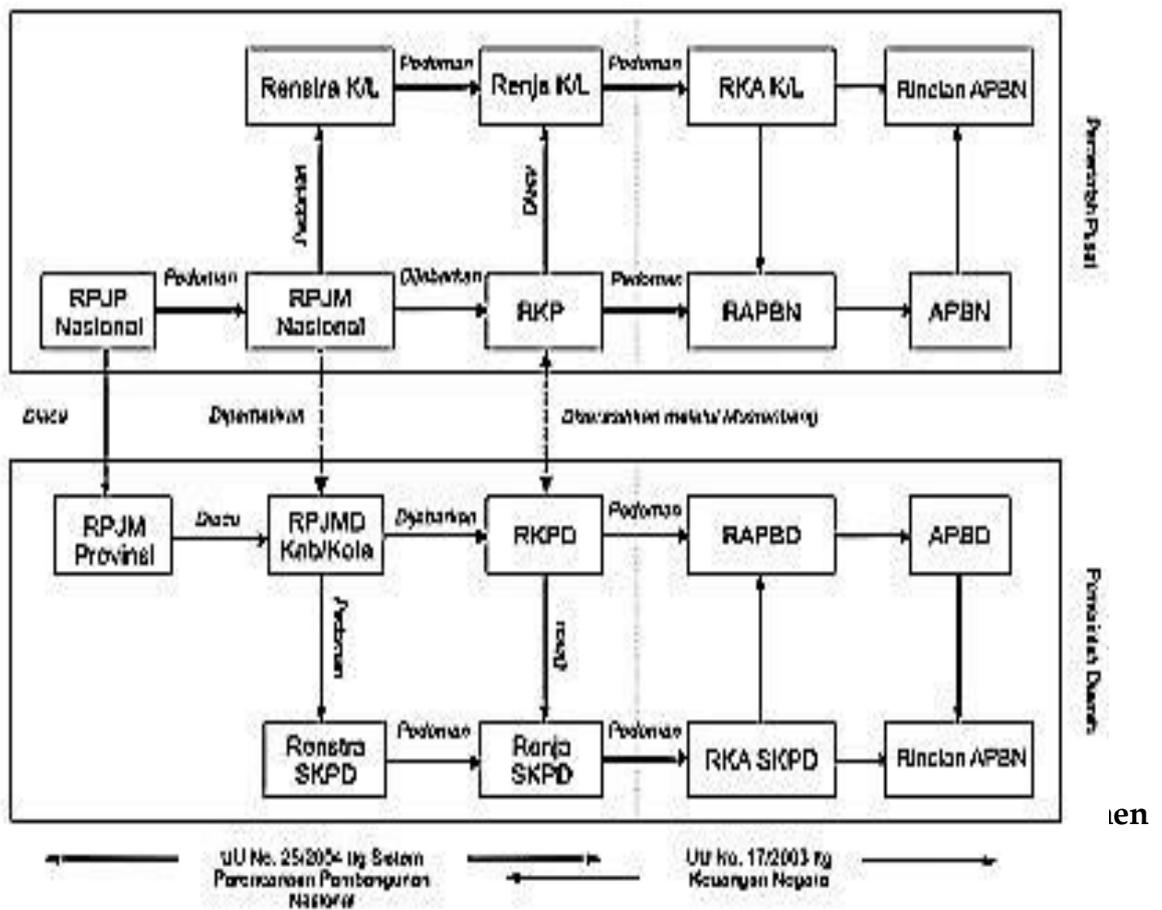
Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja
 - Orientasi mengenai Renja
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
 - Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Pengolahan Data dan Informasi

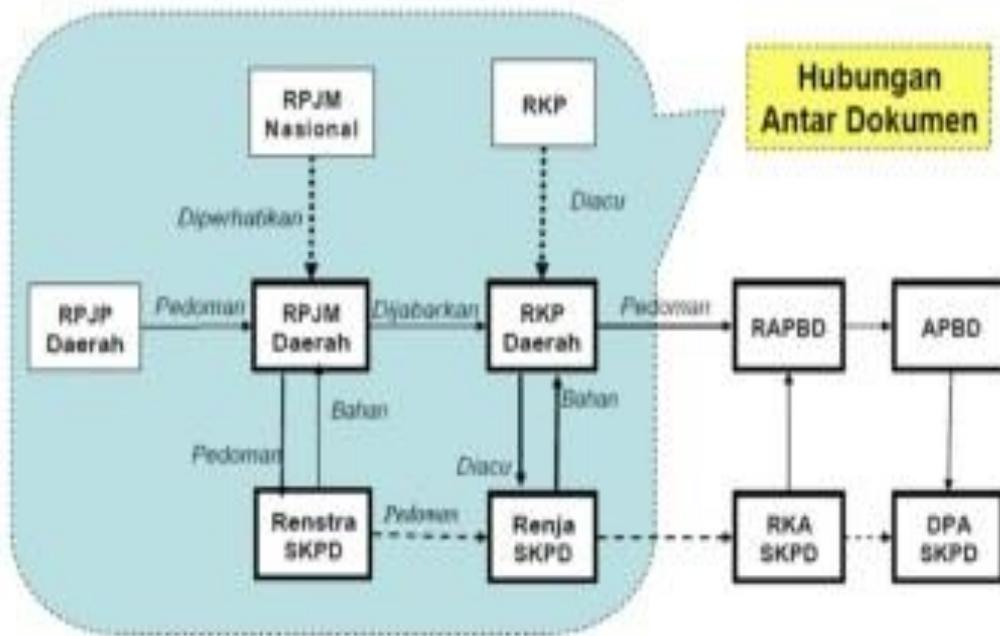
Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

- c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
 - Pengolahan data dan informasi
 - Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
 - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah
 - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
 - Telaah terhadap rancangan awal RKPD
 - Perumusan tujuan dan sasaran
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
 - Perumusan kegiatan prioritas
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah
 - Penyempurnaan rancangan kerja Perangkat Daerah
 - Pembahasan forum Perangkat Daerah dan
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada RKPD
- f. Penetapan Renja.

Adapun skema hubungan perencanaan dengan penganggaran dibawah ini :



Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
 13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
30. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 657, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4780);
32. Peraturan Menkominfo RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 33. Peraturan Menkominfo RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tatacara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 34. Peraturan Menkominfo RI Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 35. Peraturan Menkominfo RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 38. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 06);
 39. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 01);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 02 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03));
41. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 3);
44. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38);
45. Peraturan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 39);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tahun 2024 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024, sedangkan tujuan adalah :

1. Acuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dalam mengoperasikan RKPD Kabupaten Merangin tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Merangin.
2. Merumuskan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin selama tahun 2024.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindaklanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang pemuatan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Sejauh mana tingkat kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Uraian Mengenai :

- Proses yang dilakukan yaitu Membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan.
- Penjelasan Mengenai Alasan Proses tersebut dilakukan
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, Misalnya: Terdapat Rumusan Program dan Kegiatan Baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau Program dan Kegiatan cocok Namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD

maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indilatif, maupun kombinasi keduanya.
- Rencana Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang Indikator Kinerja, Kelompok sasaran serta lokasi kegiatan dan kebutuhan dana indikatof Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2=2022-2=2010) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Realisasi Program /Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media KOMunikasi Publik
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- e. Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi
 - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penetapan Kebijakan tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Faktor-faktor penyebab kurang terpenuhinya target kinerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tahun 2023 adalah sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Forum KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) pada Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tidak terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya :
 - Data KIM di kecamatan belum valid.
 - Masih ada kecamatan yang belum memiliki KIM.Dengan tidak terlaksananya kegiatan ini tentunya akan berpengaruh pada hasil dari target kegiatan dan program yang telah direncanakan sebelumnya.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Pengelolaan Statistik Sektoral tidak terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya :
 - Keterbatasan Sumber Daya Manusia untuk pelaksanaan Statistik Sektoral.
 - Sulitnya proses pengumpulan data Statistik Sektoral.
 - Terbatas sarana dan prasarana pelaksanaan Statistik Sektoral.
4. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang ditempuh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dalam mengatasi faktor-faktor penyebab diatas adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pendampingan Forum KIM melalui :
 - a. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada setiap desa di kabupaten Merangin.
 - b. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada setiap kecamatan di kabupaten Merangin.
 - c. Sosialisasi tentang tugas dan fungsi serta manfaat KIM.
 - d. Melakukan pembinaan rutin terhadap KIM yang sudah terbentuk.
 - e. Memberikan bantuan dana kegiatan untuk KIM kecamatan.
 - f. Pemanfaatan KIM sebagai salah satu sarana penyampaian informasi kepada masyarakat.
 - g. Melaksanakan lomba KIM antar kecamatan.
2. Pelaksanaan Statistik Sektoral, melalui :
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan statistik sektoral.
 - b. Melakukan sosialisasi statistik sektoral kepada semua perangkat daerah.
 - c. Penyiapan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan statistik daerah.
 - d. Melakukan kerjasama yang baik dengan Badan Pusat Statistik kabupaten, propinsi maupun pusat.

Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin melalui Diklat Teknis, kursus-kursus, workshop, seminar-seminar nasional dan regional serta Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan.
2. Pengoptimalan pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana komunikasi dan telematika.

3. Meningkatkan sinergitas dan integritas kelembagaan komunikasi dan informatika.
4. Menyediakan Sistem Aplikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Sistem Aplikasi Pelayanan Publik.
5. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan sandi telekomunikasi dalam menunjang tugas pemerintah.

Untuk melihat Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah tampak pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Merangin

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-----------------------------------|--|--|--|---|---|--|--------------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2020 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| <u>TAHUN ANGGARAN 2021</u> | | | | | | | | | | |
| 2.10.1.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi | 95 % | 96 % | 97 % | 97 % | 97 % | 96 % | | |
| 2.10.1.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Dokumen, surat yang terselesaikan | 250 Surat | 250 Surat | 250 Surat | 250 Surat | 100 % | 250 Surat | 750 Surat | 33,33 % |
| 2.10.1.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % | 12 Bulan | 36 Bulan | 30 % |
| 2.10.1.01.03 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terlunasi Pajaknya | 8 Unit | 10 Unit | 15 Unit | 15 Unit | 100 % | 10 Unit | 35 Unit | 22,8 % |
| 2.10.1.01.04 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan | - | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % | 12 Bulan | 36 Bulan | 33,33 % |
| 2.10.1.01.05 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | - | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % | 12 Bulan | 36 Bulan | 33,33 % |
| 2.10.1.01.06 | Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran | Tersedianya tenaga administrasi dan teknisi perkantoran | - | 22 Orang | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % | 22 Orang | - | - |
| 2.10.1.01.07 | Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS | Tersedianya polis dan kartu asuransi jiwa iuran kesehatan bagi tenaga kerja kontrak melalui bpjs | - | 0 Orang | 23 Orang | 23 Orang | 100 % | 0 Orang | 23 Orang | - |
| 2.10.1.01.09 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | - | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % | 12 Bulan | 36 Bulan | - |
| 2.10.1.01.10 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah jenis barang Cetakan dan Penggandaan | 8 Eks | 15 Jenis | 15 Jenis | 15 Jenis | 100 % | 15 Jenis | 45 Jenis | 17,77 % |
| 2.10.1.01.11 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang diadakan | 8 Jenis | 10 Jenis | 15 Jenis | 15 Jenis | 100 % | 10 Jenis | 35 Unit | 17,77 % |
| 2.10.1.01.12 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi | Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang diadakan | - | 6 Media Massa | 6 Media Massa | 6 Media Massa | 100 % | 6 Media Massa | 18 Media Massa | 33,33 % |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| 2.10.1.01.1 3 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai/ Pasien/ Tamu | - | 11 Bulan | 11 Bulan | 11 Bulan | 100 % | 11 Bulan | 33 Bulan | 33,33 % |
| 2.10.1.01.1 4 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan | - | 45 Kali | 45 Kali | 45 Kali | 100 % | 45 Kali | 135 Kali | 33,33 % |
| 2.10.1.01.1 5 | Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah | Frekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan | - | 50 Kali | 52 Kali | 52 Kali | 100 % | 50 Kali | 152 Kali | 32,89 % |
| 2.10.1.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan | 90 % | 92 % | 93 % | 93 % | 93 % | 92 % | | |
| 2.10.1.02.0 4 | Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang disediakan | - | - | 2 Unit | 2 Unit | 100 % | - | 2 Unit | - |
| 2.10.1.02.0 5 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan | - | - | 1 Unit | 1 Unit | 100 % | - | 1 Unit | - |
| 2.10.1.02.0 8 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan | - | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 100 % | 1 Unit | 3 Unit | 33,33 % |
| 2.10.1.02.1 1 | Pengadaan mebeleur | Jumlah Meubeler yang diadakan | 11 Unit | 15 Unit | 50 Unit | 50 Unit | 100 % | 15 Unit | 80 Unit | 18,75 % |
| 2.10.1.02.1 2 | Pengadaan komputer | Jumlah perangkat komputer yang disediakan | - | 2 Unit | 10 Unit | 10 Unit | 100 % | 2 Unit | 14 Unit | 14,28 % |
| 2.10.1.02.1 4 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | - | - | 1 Unit | 1 Unit | 100 % | - | 1 Unit | - |
| 2.10.1.02.1 5 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara | - | 2 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 100 % | 2 Unit | 8 Unit | 25 % |
| 2.10.1.02.1 6 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | - | 8 Unit | 9 Unit | 9 Unit | 100 % | 8 Unit | 25 Unit | 32 % |
| 2.10.1.02.1 8 | Rehabilitasi Sedang/berat gedung Kantor | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor yang diadakan | - | - | 1 Unit | 1 Unit | 100 % | - | 1 Unit | - |
| 2.10.1.02.2 0 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | - | 13 Unit | 14 Unit | 14 Unit | 100 % | 13 Unit | 40 Unit | - |
| 2.10.1.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan | | 95 % | 96 % | 96 % | 96 % | 95 % | | |
| 2.10.1.03.0 1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas dan atributnya yang disediakan | - | 31 Stel | 60 Stel | 60 Stel | 100 % | 31 Stel | 122 Stel | - |
| 2.10.1.03.0 2 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah Pakaian khusus yang disediakan | - | - | 31 Stel | 31 Stel | 100 % | - | 31 Stel | - |
| 2.10.1.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kompetensi teknis Aparatur Sipil Negara | | 41 % | 45 % | 45 % | 45 % | 41 % | | |

| | | (ASN) | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|---------|
| 2.10.1.05.02 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi Peraturan-Undangan | - | - | 10 Orang | 10 Orang | 100 % | - | 10 Orang | - |
| 2.10.1.05.03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah PNS yang mengikuti Bintek Tekhnis Fungsional | - | 5 Orang | 8 Orang | 8 Orang | 100 % | 5 Orang | 18 Orang | - |
| 2.10.1.06 | Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Nilai SAKIP/LAKIP | | BB | 75,70 % | 75,70 % | 75,70 % | BB | | |
| 2.10.1.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah LAKIP SKPD yang disusun | 6 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 100 % | 1 Dok | 3 Dok | 50 % |
| 2.10.1.11 | Program Perencanaan Perangkat Daerah | Pengembangan Pelayanan Publik dengan e-Planning | | | 96 % | 96 % | 96 % | | | |
| 2.10.1.11.01 | Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD | Tersedianya dokumen Rencana Kerja SKPD selama 5 Tahun | 8 Dok | 1 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 100 % | 1 Dok | 4 Dok | 50 % |
| 2.10.1.11.02 | Penyusunan Rencana Kerja OPD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 100 % | 2 Dok | 6 Dok | 33,33 % |
| 2.10.1.11.03 | Penyusunan Rencana Anggaran OPD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 100 % | 2 Dok | 6 Dok | 33,33 % |
| 02.10.1.20 | Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik | Persentase Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik | | 10 % | 70 % | 70 % | 70 % | 10 % | | |
| 02.10.1.20.01 | Pembinaan dan Pendampingan Forum KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk | 5 KIM | 4 KIM | 5 KIM | 5 KIM | 100 % | 4 KIM | 13 KIM | 38,46 % |
| 02.10.1.20.02 | Pengendalian dan Pengawasan Media Informasi Publik dan Penyiaran | Jumlah Media Informasi Publik dan Penyiaran yang diawasi | - | 4 Kali | - | - | - | 4 Kali | 8 Kali | - |
| 02.10.1.20.03 | Pengawasan dan Pengendalian Standarisasi Telekomunikasi | Jumlah Menara yang diawasi | 132 Unit | 131 Unit | 135 Unit | 135 Unit | 135 Unit | 131 Unit | 131 Unit | 99,24 % |
| 02.10.1.20.04 | Pengelolaan dan Standarisasi serta Keamanan Layanan LPSE | Jumlah LPSE yang dikelola dan dikembangkan | - | - | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | - | - | - |
| 02.10.1.20.05 | Pembinaan dan Pengawasan Layanan Internet | Jumlah Warnet yang diawasi | - | 25 Unit | 25 Unit | 25 Unit | 100 % | 25 Unit | 25 Unit | - |
| 02.10.1.20.06 | Penyelenggaraan dan Invoasi Pembangunan Daerah | Jumlah Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Daerah | - | 1 Kali | - | - | - | 1 Kali | 1 Kali | - |
| 02.10.1.20.07 | Pengelolaan Layanan Pejabat Pengelola | Tersedianya Layanan Pejabat Pengelola | - | 4 Kali | - | - | - | 4 Kali | 4 Kali | - |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|-------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|
| | Informasi dan Dokumentasi | Informasi Daerah (PPID) | | | | | | | | |
| 02.10.1.20.08 | Fasilitasi dan Kerjasama Penyiaran Radio Publik | Fasilitasi dan Kerjasama Penyiaran dan Radio Publik yang dipelihara | | | | | | | | |
| 02.10.1.20.09 | Pengelolaan Layanan Media Center | Terciptanya Layanan Media Center dan Media Center Temporary Kab. Merangin | | | | | | | | |
| 02.10.1.20.10 | Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Peralatan TIK | Jumlah Infrastruktur Jaringan Internet Untuk Masyarakat yang dibangun | | | | | | | | |
| 02.10.1.20.11 | Pembangunan dan Pengelolaan Smart City | Terlaksananya Operasional Jaringan Internet Untuk Masyarakat | | | | | | | | |
| 02.10.1.20.12 | Pembuatan dan Pengelolaan Informasi, Website, dan Aplikasi Layanan Pengaduan Online | Jumlah Website dan Sistem Pengaduan Online yang dibangun | - | 1 Unit | 6 Unit | 6 Unit | 6 Unit | 1 Unit | 1 Unit | |
| 02.10.1.20.13 | Pengelolaan Data Elektronik dan Integrasi Sistem Informasi | Jumlah Sistem Informasi terintegrasi yang dibangun | - | 1 Unit | - | - | | 1 Unit | 1 Unit | |
| 02.10.1.20.14 | Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian | Terlaksananya Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian | - | 12 Kali | - | - | | 12 Kali | 12 Kali | |
| 02.10.1.22 | Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral dan Persandian | Terlaksananya Operasional Sistem Integrator Antar Sistem Informasi SKPD | | | | | 10 % | | | |
| 02.10.1.22.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Jumlah Data Statistik yang diolah | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | | 1 Dok | 1 Dok | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-----------------------------------|--|--|--|---|---|--|--------------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| <u>TAHUN ANGGARAN 2022</u> | | | | | | | | | | |
| 2.10.2.10.1 .01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | 97 % | 97 % | | | | |
| 2.10.2.10.1 .01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang terselesaikan | 250 Surat | 250 Surat | 250 Surat | 250 Surat | | 250 Surat | | |
| 2.10.2.10.1 .01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | | 12 Bulan | | |
| 2.10.2.10.1 .01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terlunasi pajaknya | 8 Unit | 10 Unit | 15 Unit | 15 Unit | | 10 Unit | | |
| 2.10.2.10.1 .01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan | | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | | 12 Bulan | | |
| 2.10.2.10.1 .01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Peralatan Kebersihan yang disediakan | | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | | 12 Bulan | | |
| 2.10.2.10.1 .01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor yang disediakan | | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | | 12 Bulan | | |
| 2.10.2.10.1 .01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 8 Eks | 15 Jenis | 15 Jenis | 15 Jenis | | 15 Jenis | | |
| 2.10.2.10.1 .01.12 | Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Komponen Listrik yang disediakan | 8 Jenis | 10 Jenis | 10 Jenis | 10 Jenis | | 10 Jenis | | |
| 2.10.2.10.1 .01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi | Jumlah Bacaan dan Publikasi yang disediakan | | 6 Media Massa | 6 Media Massa | 6 Media Massa | | 6 Media Massa | | |
| 2.10.2.10.1 .01.17 | Penyediaan Makan dan Minuman | Makan dan Minum harian Pegawai/Rapat/Lembur/Tamu yang disediakan | | 11 Bulan | 11 Bulan | 11 Bulan | | 11 Bulan | | |
| 2.10.2.10.1 .01.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan | | 45 Kali | 45 Kali | 45 Kali | | 45 Kali | | |
| 2.10.2.10.1 .01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran | Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran | | 22 Orang | 23 Orang | 23 Orang | | 22 Orang | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|---------|---------|-------------|-------------|--|---------|--|--|
| 2.10.2.10.1 .01.20 | Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah | Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah yang dilaksanakan | | 50 Kali | 52 Kali | 52 Kali | | 50 Kali | | |
| 2.10.2.10.1 .01.25 | Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS | Jumlah Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS | | 0 Orang | 23 Orang | 23 Orang | | 0 Orang | | |
| 2.10.2.10.1 .02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran | | | 93 % | 93 % | | | | |
| 2.10.2.10.1 .02.04 | Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan | | | 2 Unit | 2 Unit | | | | |
| XX.XX.02. 04 | Pengadaan mobil jabatan | Jumlah Mobil jabatan yang diadakan | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | |
| 2.10.2.10.1 .02.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan | 2 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | | | | |
| 2.10.2.10.1 .02.07 | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Kerja | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Kerja yang diadakan | 30 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | | | | |
| 2.10.2.10.1 .02.10 | Pengadaan mebeleur | Jumlah Meubeler yang diadakan | 11 Unit | 15 Unit | 50 Unit | 50 Unit | | 15 Unit | | |
| 2.10.2.10.1 .02.11 | Pengadaan komputer | Jumlah perangkat komputer yang disediakan | | 2 Unit | 10 Unit | 10 Unit | | 2 Unit | | |
| 2.10.2.10.1 .02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | |
| 2.10.2.10.1 .02.23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara | | 2 Unit | 4 Unit | 4 Unit | | 2 Unit | | |
| 2.10.2.10.1 .02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | | 8 Unit | 9 Unit | 9 Unit | | 8 Unit | | |
| 2.10.2.10.1 .02.26 | Pemeliharaan Rutun/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Kerja | Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang dipelihara | | 13 Unit | 14 Unit | 14 Unit | | 13 Unit | | |
| 2.10.2.10.1 .02.42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Jumlah gedung Kantor yang dipelihara | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | |
| 2.10.2.10.1 .03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana | | | 96 % | 96 % | | | | |
| 2.10.2.10.1 .03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Pakaian dinas dan atributnya yang disediakan | | 31 Stel | 60 Stel | 60 Stel | | 31 Stel | | |
| 2.10.2.10.1 .03.05 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah Pakaian khusus yang disediakan | | | 31 Stel | 31 Stel | | | | |
| 2.10.2.10.1 .05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pelatihan | | | 45 % | 45 % | | | | |
| 2.10.2.10.1 .05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah PNS Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | 10 Orang | 10 Orang | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-------|---------|----------------|----------------|--|---------|--|--|
| 2.10.2.10.1.05.02 | Sosialisasi Peraturan Perundang undangan | Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan | | | 10 Orang | 10 Orang | | | | |
| 2.10.2.10.1.05.03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek | | 5 Orang | 8 Orang | 8 Orang | | 5 Orang | | |
| 2.10.2.10.1.06 | Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah | | | 75,70 % | 75,70 % | | | | |
| 2.10.2.10.1.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Kinerja OPD yang disusun | 6 Dok | 1 Dok | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | 1 Dok | | |
| 2.10.2.10.1.06.02 | Penyusunan Laporan Keuangan OPD | Jumlah Laporan Tahunan OPD yang disusun | 1 Dok | 2 Dok | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | 2 Dok | | |
| 2.10.2.10.1.06.005 | Penyusunan Laporan Tahunan OPD | Jumlah Laporan Tahunan OPD yang disusun | 1 Dok | 2 Dok | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | 2 Dok | | |
| 2.10.2.10.1.11 | Program Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Keselarasan Renstra terhadap Renja | | | 96 % | 96 % | | | | |
| 2.10.2.10.1.11.02 | Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Kerja yang disusun | 8 Dok | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | | | |
| 2.10.2.10.1.11.04 | Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran yang disusun | 2 Dok | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | | | |
| 2.10.2.10.1.23 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase Layanan Komunikasi Publik | | | 70 % | 70 % | | | | |
| 2.10.2.10.1.23.01 | Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah | | | 1 Dok | 1 Dok | | | | |
| 2.10.2.10.1.23.02 | Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik | Jumlah Website Perangkat Daerah yang dibangun | | 1 Unit | 6 Unit | 6 Unit | | 1 Unit | | |
| 2.10.2.10.1.23.03 | Pembinaan dan Pendampingan Forum Kim (Kelompok Informasi Masyarakat) | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk dan dibina | 5 KIM | | 5 KIM | 5 KIM | | | | |
| 2.10.2.10.1.23.04 | Penyebarluasan Informasi Melalui Media | Frekuensi Penyebarluasan Informasi | | | 3 Kali | 3 Kali | | | | |
| 2.10.2.10.1.24 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika | | | 10 % | 10 % | | | | |
| 2.10.2.10.1.24.01 | Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Peralatan TIK | Jumlah Infrastruktur jaringan dan Peralatan TIK yang dibangun | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--------|---------|-------------------|-------------------|--|----|--|
| 2.10.2.10.1 .24.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus Terintegrasi | Jumlah Aplikasi yang terintegrasi | | | 4 Sistem Aplikasi | 4 Sistem Aplikasi | | | |
| 2.10.2.10.1 .24.03 | Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City | Jumlah Smart City yang dibangun | | | 1 Unit | 1 Unit | | | |
| 2.10.2.10.1 .24.04 | Penyelenggaraan Nama Domain dan E-Government (SPBE) | Jumlah system digital yang dibangun | | | 2 Unit | 2 Unit | | | |
| 2.10.2.10.1 .24.05 | Pembinaan dan Pengawasan Layanan Internet | Jumlah warnet yang dibina | | 25 Unit | 25 Unit | 25 Unit | | 25 | |
| 2.10.2.10.1 .24.06 | Pengelolaan dan Standarisasi serta Keamanan Layanan LPSE | Jumlah LPSE yang diupdate | | | 1 Unit | 1 Unit | | | |
| 2.10.2.10.1 .24.07 | Pengawasan dan Pengendalian Standarisasi Telekomunikasi | Jumlah menara yang diawasi | | | 135 Unit | 135 Unit | | | |
| 2.14.2.10.1 .25 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase Data Sektoral Tersedia | | | 25 % | 25 % | | | |
| 2.14.2.10.1 .25.01 | Penyusunan Database Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Statistik Sektoral yang disusun | | | 1 Dok | 1 Dok | | | |
| 2.14.2.10.1 .25.02 | Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan | | | 1 Unit | 1 Unit | | | |
| 2.15.2.10.1 .26 | Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah | | | 10 % | 10 % | | | |
| 2.15.2.10.1 .26.01 | Pengembangan dan Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi | Jumlah sistem yang dibangun | 1 Unit | | 1 Sistem Aplikasi | 1 Sistem Aplikasi | | | |
| 2.15.2.10.1 .26.02 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Keamanan Informasi | Frekuensi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | | | 4 Kali | 4 Kali | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|----------------------------|--|--|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| TAHUN ANGGARAN 2023 | | | | | | | | | | |
| 2.16.01 | Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | | | | | |
| 2.16.01.2.10 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 2.16.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renja dan Renstra | 8 Dok | | | | | | | |
| 2.16.01.2.1.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA | 2 Dok | | | | | | | |
| 2.16.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA | 2 Dok | | | | | | | |
| 2.16.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD | 6 Dok | | | | | | | |
| 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | |
| 2.16.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | | | | | | | |
| 2.16.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jasa Administrator Keuangan yang disediakan | 12 Bulan | | | | | | | |
| 2.16.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 1 Dok | | | | | | | |
| 2.16.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan | Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran PD | 1 Dok | | | | | | | |
| 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 2.16.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Alat Kelengkapan Listrik dan Elektronik Perangkat Daerah yang disediakan | 8 Jenis | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | Banguan Kantor | | | | | | | | |
| 2.16.01.2.0 6.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Peralatan dan Bahan Pembersih Kantor yang disediakan | 30 Unit | | | | | | |
| 2.16.01.2.0 6.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah yang disediakan | 8 Eks | | | | | | |
| 2.16.01.2.0 6.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Frekwensi Perjalanan dinas yang disediakan | 99 Kali | | | | | | |
| 2.16.01.2.0 7 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | |
| 2.16.01.2.0 7.05 | Pengadaan Meubel | Set Meubel Perangkat Daerah yang disediakan | 11 Unit | | | | | | |
| 2.16.01.2.0 7.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguna Lainnya | Perlengkapan Gedung Kantor Perangkat Daeah yang diadakan | 2 Unit | | | | | | |
| 2.16.01.2.0 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | |
| 2.16.01.2.0 8.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Surat Keluar Perangkat Daerah | 250 Surat | | | | | | |
| 2.16.01.2.0 8.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 Bulan | | | | | | |
| 2.16.01.2.0 8.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Makan dan Minuman Pegawai yang disediakan | 64 Orang | | | | | | |
| 2.16.01.2.0 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | |
| 2.16.01.2.0 9.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional Perangkat Daerah yang dipelihara | 2 Unit | | | | | | |
| 2.16.01.2.0 9.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah yang dipelihara | 8 Unit | | | | | | |
| 2.16.01.2.0 9.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 17 Unit | | | | | | |
| 2.16.02 | Program Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.16.02.2.0 1 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | | | | | |
| 2.16.02.2.0 1.04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Pengelolaan Internet Sehat | 2 Kali | | | | | | | |
| 2.16.02.2.0 1.05 | Pengelolaan media Komunikasi Publik | Media Komunikasi Publik yang dikelola | 160 Media | | | | | | | |
| 2.16.02.2.0 1.06 | Pelayanan Informasi Publik | PPID Pembantu yang dibentuk | 56 Unit | | | | | | | |
| 2.16.02.2.0 1.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas | Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk | 5 KIM | | | | | | | |
| 2.16.03 | Program Aplikasi Informatika | | | | | | | | | |
| 2.16.03.2.0 1.12 | Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kab/Kota | | | | | | | | | |
| 2.16.03.2.0 2.01 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Daerah | SPBE yang dikelola | 1 Unit | | | | | | | |
| 2.16.03.2.0 2.07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Aplikasi yang dikembangkan | 2 Aolikasi | | | | | | | |
| 2.16.03.2.0 2.09 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Smart City yang dikelola | 1 Unit | | | | | | | |
| 2.16.03.2.0 2.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Menara Telekomunikasi yang diawasi | 132 Unit | | | | | | | |
| 2.20.02 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | | | | | | | | |
| 2.20.02.2.0 1 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota | | | | | | | | | |
| 2.20.02.2.0 1.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Dokumen Statistik Sektoral yang disusun | 1 Dok | | | | | | | |
| 2.21.02 | Program Penyelenggaraan Persandian untuk | | | | | | | | | |

| | Pengamanan Informasi | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|------|--|--|--|--|--|--|
| 2.21.02.2.0 1 | Penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 2.21.02.2.0 1.04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota | Layanan Keamanan Informasi yang dikelola | 1 | Unit | | | | | | |

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin berkewajiban untuk melaksanakan SPM sesuai target yang sudah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019 - 2023.

Ditinjau dari segi hukum SPM bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dapat bersifat "*beziking*" yaitu penetapan materi yang telah diatur oleh payung hukum yang lebih tinggi, namun bersifat juga "*regeling*" yaitu pengaturan materi dapat ditambahkan sesuai kemampuan pihak yang mendapat materi pengaturan. SPM bidang komunikasi dan informatika merupakan penjabaran dari target yang telah dipandu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan kajian diatas terdapat beberapa capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin sampai dengan posisi 30 November 2022 sebagai berikut :

A. Kinerja Pelayanan berdasarkan Indikator Program dan Kegiatan, sebagai berikut :

1. Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral mencapai 100%
2. Persentase Pengawasan dan Pengendalian Standarisasi Telekomunikasi mencapai 99,24%
3. Persentase Pembuatan dan Pengelolaan Informasi, Website, dan Aplikasi Layanan Pengaduan Online mencapai 6 unit

Kinerja pelayanan berdasarkan indikator SPM, sebagai berikut

1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :

- Media massa seperti majalah, radio, dan televisi dapat dicapai 12 kali per tahun dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 12 kali per tahun.
 - Media baru seperti website (media online) dapat dicapai setiap hari dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak setiap hari.
 - Media tradisional seperti pertunjukan rakyat dapat dicapai 1 kali per tahun dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 12 kali per tahun.
 - Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dapat dicapai 12 kali per tahun per Kecamatan dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 12 kali per tahun per Kecamatan.
 - Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho dapat dicapai 4 kali per tahun dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 12 kali per tahun.
2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan dapat dicapai 25% dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 50%.

Secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tampak pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Merangin

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | |
|----|--|---|--|---------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | Tahun 2019(Tahun n-2) | Tahun 2020(Tahun n-1) | Tahun 2021 (Tahun n) | Tahun 2022 (Tahun n+1) | Tahun 2019 (Tahun n-2) | Tahun 2020 (Tahun n-1) | Tahun 2021 (Tahun n) | Tahun 2022 (Tahun n+1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik | Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional | Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat | 100% | - | - | - | 98% | - | - | - |
| 2 | Jumlah Sistem Informasi Pembangunan Daerah | Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | 4 SIM | - | - | - | 3 SIM | - | - | - |
| 3 | Cakupan Layanan Informasi Publik | - | - | - | 149 Desa | - | - | - | 147 Desa | - | - |
| 4 | Persentase Layanan Komunikasi Publik | - | - | - | - | 70% | 75% | - | - | 70% | 75% |
| 5 | Persentase Pengelolaan Aplikasi informatika | - | - | - | - | 10% | 20% | - | - | 10% | 20% |
| 6 | Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Persandian | - | - | - | 100% | - | - | - | 90% | - | - |
| 7 | Persentase Data Sektoral Tersedia | - | - | - | - | 25% | 35% | - | - | 25% | 35% |
| 8 | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | - | - | - | - | 10% | 25% | - | - | 10% | 25% |

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :
 - 1) Permasalahan terkait kesekretariatan :
 - Belum optimalnya kapasitas SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
 - 2) Permasalahan dibidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik.

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik memiliki beberapa permasalahan, antara lain :

 - Kurangnya ASN yang memiliki kemampuan teknis di bidang Layanan Komunikasi Publik.
 - Masih kurangnya sarana dan prasana penyediaan informasi untuk pelayanan publik.
 - Belum tersedia Sistem Aplikasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang lebih mudah dan efisien.
 - Belum optimalnya pengelolaan Media Center.
 - Belum optimalnya pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
 - Belum optimalnya Media Penyiaran Publik seperti Radio.
 - Kurangnya pembinaan pemerintah terhadap Kelompok Informasi Masyarakat maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat.
 - 3) Permasalahan dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki beberapa permasalahan, antara lain :

- Kurangnya ASN yang memiliki kemampuan teknis pengelolaan jaringan komputer.
 - Belum tersedianya peralatan jaringan komputer yang memadai.
 - Belum tersedianya Sistem Aplikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - Integrasi Sistem Informasi belum tercapai.
 - Pengelolaan jaringan *internet* dan *intranet* belum optimal.
- 4) Permasalahan dibidang Layanan Komunikasi dan Informatika
- Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika memiliki beberapa permasalahan, antara lain :
- Pengelolaan Website kabupaten belum maksimal.
 - Belum tersedianya Server jaringan yang memadai.
 - Belum optimalnya pengawasan penggunaan peralatan teknologi informasi.
 - Kurangnya pedoman teknis terkait pelaksanaan E-Government.
 - Kurangnya sarana dan prasana dalam pelaksanaan persandian antar perangkat daerah.
3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian Program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- a. Membantu Pemerintah Kabupaten Merangin untuk meningkatkan pelayanan publik dibidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat.
 - b. Membantu Pemerintah Kabupaten Merangin untuk meningkatkan penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat.
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut :
- a. Tantangan
- Adapun tantangan pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut :

- Masih Rendahnya Kualitas SDM Penunjang Pelayanan.
- Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan.
- Belum tersedianya Server jaringan yang memadai.
- Belum optimalnya Pengelolaan jaringan *internet* dan *intranet*.
- Belum tersedia Sistem Aplikasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang lebih mudah dan efisien.
- Belum tersedianya Sistem Aplikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Belum terlaksananya Integrasi Sistem Informasi.
- Belum maksimalnya Pengelolaan Website kabupaten.
- Belum terlaksananya E-Government atau SPBE.
- Belum terlaksananya penggunaan sandi dalam pengiriman data antar perangkat daerah.
- Masih banyak terdapat daerah yang belum terjangkau sinyal (blank spot).

b. Peluang

Adapun Peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut :

- Adanya peluang Aparatur untuk mengikuti diklat teknis baik formal maupun non formal.
- Adanya peluang untuk penambahan tenaga teknis di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Adanya peluang penambahan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana.
- Adanya kebijakan pemerintah untuk penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di semua daerah.
- Adanya kebijakan pemerintah untuk penerapan pelaksanaan persandian di semua perangkat daerah.
- Tersedianya beberapa Sistem Aplikasi di Kementerian.
- Adanya kerjasama yang baik dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi.

- Adanya ketersediaan media informasi dan teknologi untuk didayagunakan.
5. Formulasi isu - isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :
1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Melalui program ini diharapkan akan memberikan peningkatan persentase layanan komunikasi publik kepada masyarakat sehingga kebutuhan informasi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan efisien.
 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Melalui program ini diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika mampu menyediakan berbagai jenis sistem aplikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga semua perangkat daerah dapat meningkatkan penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya masing-masing.
 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
Melalui program ini diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika mampu melaksanakan Statistik sektoral di Kabupaten Merangin sehingga akan menghasilkan data yang akurat dan valid tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan data lainnya yang berhubungan dengan Kabupaten Merangin.
 4. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
Melalui program ini diharapkan semua perangkat daerah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah sehingga data yang dikirimkan dapat terlindungi.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika untuk setiap tahun anggaran.

2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sehingga akan mendapatkan data yang akurat dan valid mengenai kebutuhan riil masyarakat (prosedur Baten Up).
3. Penjelasan temuan - temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program - program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya

Secara rinci review terhadap Rancangan awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tahun 2022 tampak pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel
Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Merangin

Dinas Komunikasi dan Informatika

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Catatan Penting |
|----|--|---|--|----------------|----------------|--|---|--|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | <i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</i> | <i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i> | <i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</i> | 98 % | 3.595.971.187 | <i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</i> | <i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i> | <i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</i> | 98 % | 5.532.334.950 | |
| | <i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | <i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i> | <i>Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</i> | | 79.651.250 | <i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | <i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i> | <i>Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</i> | | 104.150.300 | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | Jumlah dokumen Renja dan renstra | 8 Dok | 19.015.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | Jumlah dokumen Renja dan renstra | 8 Dok | 21.015.000 | |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | Jumlah dokumen RKA | 2 Dok | 19.145.750 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | Jumlah dokumen RKA | 2 Dok | 29.146.000 | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | Jumlah Dokumen DPA | 2 Dok | 19.572.500 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | Jumlah Dokumen DPA | 2 Dok | 30.616.500 | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD | 6 Dok | 21.918.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD | 6 Dok | 23.372.800 | |

| | SKPD | | | | | SKPD | | | | | | |
|----|---|----------------------------------|--|----|-------|---------------|---|----------------------------------|--|----|-------|---------------|
| 5 | Admnsitrasi Keuangan Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | Cakupan Administrasi Keuangan Daerah yang disediakan | 12 | Bulan | 3.039.705.537 | Admnsitrasi Keuangan Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | Cakupan Administrasi Keuangan Daerah yang disediakan | 12 | Bulan | 3.276.558.750 |
| 6 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas Komunikasi dan Informatika | Gaji dan Tunjangan ASN | 12 | Bulan | 2.846.275.537 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas Komunikasi dan Informatika | Gaji dan Tunjangan ASN | 12 | Bulan | 3.026.433.750 |
| 7 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | Jasa Administrator Keuangan yang disediakan | 12 | Bulan | 167.610.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | Jasa Administrator Keuangan yang disediakan | 12 | Bulan | 217.200.000 |
| 8 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran PD | 1 | Dok | 12.621.500 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran PD | 1 | Dok | 17.725.500 |
| 9 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | Makan dan Minum Harian Pegawai/Rapat/Lembur/Tamu yang Disediakan | 1 | Dok | 13.198.500 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | Makan dan Minum Harian Pegawai/Rapat/Lembur/Tamu yang Disediakan | 1 | Dok | 15.199.500 |
| 10 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | | | | 264.050.800 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | | | | 489.933.800 |
| 11 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dinas Komunikasi dan Informatika | Alat/Kelengkapan Listrik dan elektronik Perangkat Daerah yang disediakan | 8 | Jenis | 6.001.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dinas Komunikasi dan Informatika | Alat/Kelengkapan Listrik dan elektronik Perangkat Daerah yang disediakan | 8 | Jenis | 12.004.000 |
| 12 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dinas Komunikasi dan Informatika | Peralatan dan bahan Pembersih Kantor yang disediakan | 30 | Unit | 34.011.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dinas Komunikasi dan Informatika | Peralatan dan bahan Pembersih Kantor yang disediakan | 30 | Unit | 40.815.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|----------|-------------------|---|---|--|----------|----------------------|--|
| 13 | Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Barang cetak dan Penggadaan Perangak Daeah yang disediakan | 8 Eks | 9.000.000 | Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Barang cetak dan Penggadaan Perangak Daeah yang disediakan | 8 Eks | 13.000.000 | |
| 14 | Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | Frekuensi Perjalanan Dinas yang disediakan | 99 Kali | 215.038.800 | Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | Frekuensi Perjalanan Dinas yang disediakan | 99 Kali | 424.114.800 | |
| II | Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | Cakupan Barang Milik daerah Urusan Penunjang pemerintah Daerah | | 19.948.500 | Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | Cakupan Barang Milik daerah Urusan Penunjang pemerintah Daerah | | 1.225.269.000 | |
| 1 | Pengadaan Meubel | Dinas Komunikasi dan Informatika | Set Meubel yang disediakan | 11 Unit | 11.608.500 | Pengadaan Meubel | Dinas Komunikasi dan Informatika | Set Meubel yang disediakan | 11 Unit | 76.640.000 | |
| 2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguna Lainnya | Dinas Komunikasi dan Informatika | Perlengkapan gedung Kantor Perangkat Daerah yang disediakan | 2 Unit | 8.340.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguna Lainnya | Dinas Komunikasi dan Informatika | Perlengkapan gedung Kantor Perangkat Daerah yang disediakan | 2 Unit | 214.074.000 | |
| | | | | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan | | 260.500.000 | |
| | | | | | | Pengadaan kendaraan Dinas operasional atau Lapangan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan | | 460.500.000 | |
| | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dinas Komunikasi dan Informatika | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara | | 213.555.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | | | 67.349.100 | Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | | | 82.924.600 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dinas Komunikasi dan | Surat Keluar Perangkat Daerah | 250 Unit | 750.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dinas Komunikasi dan | Surat Keluar Perangkat Daerah | 250 Unit | 2.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------------|--|----|-------|-------------|--|----------------------------------|--|----|-------|-------------|
| | | Informatika | | | | | Informatika | | | | | |
| 5 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dinas Komunikasi dan Informatika | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 | Bulan | 42.599.100 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dinas Komunikasi dan Informatika | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 | Bulan | 50.424.600 |
| 6 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umu Kantor | Dinas Komunikasi dan Informatika | Makanan dan Minuman Pegawai yang disediakan | 64 | Orang | 24.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umu Kantor | Dinas Komunikasi dan Informatika | Makanan dan Minuman Pegawai yang disediakan | 64 | Orang | 30.500.000 |
| | | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | | | | 44.800.000 |
| | | | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Dinas Komunikasi dan Informatika | | | | 44.800.000 |
| 7 | Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | | | | 125.266.000 | Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | | | | 128.698.500 |
| 8 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kendaraan Dinas jabatan/Oeprasional perangkat daerah yang disediakan | 2 | Unit | 87.870.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kendaraan Dinas jabatan/Oeprasional perangkat daerah yang disediakan | 2 | Unit | 90.270.000 |
| 9 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah yang dipelihara | 8 | Unit | 28.336.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah yang dipelihara | 8 | Unit | 26.436.000 |
| 10 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas Komunikasi dan Informatika | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 17 | Unit | 9.060.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas Komunikasi dan Informatika | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 17 | Unit | 11.992.500 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-----------|---------------|---|---|---|-----------|----------------|--|
| III | Program Informasi dan Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | | | 2.235.513.300 | Program Informasi dan Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | | | 2.946.688.450 | |
| | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | 2.235.513.300 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | 2.2946.688.450 | |
| 1 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | Pengelolaan Internet sehat | 2 Kali | 31.220.400 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | Pengelolaan Internet sehat | 2 Kali | 61.221.000 | |
| 2 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | Media Komunikasi Publik yang dikelola | 160 Media | 2.107.106.000 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | Media Komunikasi Publik yang dikelola | 160 Media | 2.370.005.950 | |
| 1 | Pelayanan Informasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | PPID Pembantu yang dibentuk | 56 Unit | 45.000.000 | Pelayanan Informasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | PPID Pembantu yang dibentuk | 56 Unit | 95.000.000 | |
| 2 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk | 5 Kim | 52.186.900 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk | 5 Kim | 420.461.500 | |
| V | Program Aplikasi Informatika | Dinas Komunikasi dan Informatika | | | 279.154.100 | Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program Aplikasi Informatika | Dinas Komunikasi dan Informatika | | 10.052.273.250 | |
| | Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota | Dinas Komunikasi dan Informatika | | | 279.154.100 | | Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota | Dinas Komunikasi dan Informatika | | 10.052.273.250 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|------------|-------------------|--|---|--|-------------|-------------------|--|
| 1 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Komunikasi dan Informatika | SPBE yang dikelola | 1 Unit | 39.855.900 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Komunikasi dan Informatika | SPBE yang dikelola | 1 Unit | 89.196.750 | |
| 2 | Pengembangan aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Dinas Komunikasi dan Informatika | Aplikasi yang dikembangkan | 2 Aplikasi | 53.451.400 | Pengembangan aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Dinas Komunikasi dan Informatika | Aplikasi yang dikembangkan | 2 Aplikasi | 228.450.600 | |
| | Pengembangan dan pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Dinas Komunikasi dan Informatika | Smart City yang dikelola | 1 Unit | 139.846.800 | | | | | 8.402.625.900 | |
| 3 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | Menara Telekomunikasi yang diawasi | 132 Unti | 46.000.000 | Penyusunan Laporan Tahunan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Jumlah Laporan Tahunan OPD yang disusun | 1 Dokumen | 1.332.000.000 | |
| VI | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Dinas Komunikasi dan Informatika | Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | 50.140.000 | Program Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra | 97 % | 75.140.000 | |
| | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah kab/Kota | Dinas Komunikasi dan Informatika | Penyelenggaraan statistic sektoral yang diadakan | | 50.140.000 | | | | | 75.140.000 | |
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dokumen Statistik Sektoral yang disusun | 1 Dok | 50.140.000 | Penyusunan Renstra Strategis (Renstra) OPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | Jumlah Dokumen Rencana Strategis yang disusun | 0 | 75.140.000 | |
| VII | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamana Informasi | Dinas Komunikasi dan Informatika | Persentase Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi | | 42.150.000 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | Persentase Layanan Komunikasi Publik | 75 % | 72.150.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|--------|-------------------|--|----------------------------------|---|-----------|-------------------|--|
| | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kab/Kota | | | | 42.150.000 | | | | | 72.150.000 | |
| 1 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota | Dinas Komunikasi dan Informatika | Layanan Keamanan Informasi yang dikelola | 1 Unit | 42.150.000 | Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 72.150.000 | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain Program Nasional yang akan dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2024 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika akan fokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi. Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan;
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman;
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien;

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada Perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin terpilih tahun 2024 - 2026. Sesuai dengan tupoksinya Dinas komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan pemerintahan Daerah di Bidang Persandian, dan urusan Pemerintahan daerah di bidang statistik serta tugas pembantuan.

a. Tujuan

Adapun Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi

b. Sasaran

Sementara sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik

2. Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral
3. Meningkatnya Keamanan data dan informasi

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel. 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2018 | Target Kinerja Sasaran Tahun 2020 |
|----|---|---|--|--------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | Menyediakan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang KOMINFO | | Kurang Baik | Kurang Baik |
| | | Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik | Persentase Layanan Komunikasi dan Informasi | % | 60 | 70 |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi | % | 0 | 25 |
| | | Meningkatnya Keamanan data dan informasi | Persentase Pengamanan Informasi Perangkat Daerah | % | 0 | 10 |

Tujuan tersebut merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (Tahun) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang secara terukur akan dicapai nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Sasaran harus spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode yang telah ditetapkan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika dan membantu Kabupaten Merangin dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika dituntut untuk menghasilkan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat, maka program dan kegiatan yang disusun harus mengutamakan kepentingan dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

A. Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

B. Urusan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika dan membantu Kepala Daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan

informatika dituntut untuk menghasilkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin sebagai salah satu OPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan 1 (satu) urusan wajib pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika, telah menyusun tahapan-tahapan implementasi perencanaan melalui program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan tujuan, sasaran dalam Visi dan Misi organisasi Kepala Daerah.

Oleh karenanya sebagai indikasi terlaksananya program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, maka tahapan-tahapan dalam menyusun perencanaan program dimulai dari menentukan tujuan dan sasaran, strategi, indikator keberhasilan, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang dibutuhkan. Adapun Program-program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin pada tahun 2023 berjumlah sebanyak 5 Program, 10 Kegiatan, dan 30 Sub Kegiatan dengan total dana sebesar Rp. 6.093.183.187,- dengan rincian sebagai berikut :

A. PROGRAM UTAMA

1. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Program Informasi dan Komunikasi Publik, kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Layanan Komunikasi Publik. Program ini merupakan Program Pendukung Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Pada program ini terdapat beberapa sub kegiatan antara lain sebagai berikut :

a. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Jumlah Konten Media Komunikasi Publik. Melalui kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan pengelolaan internet sehat yang dapat disampaikan ke masyarakat dalam upaya pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat.

b. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Jumlah Media Komunikasi Publik yang dikelola. Melalui kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan Jumlah Media Komunikasi Publik yang akan digunakan sebagai salah satu sarana penyampaian informasi kepada masyarakat tentang pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

c. Pelayanan Informasi Publik

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Jumlah PPID Pembantu yang dibentuk dan dibina. Melalui kegiatan ini diharapkan akan terbentuk dan terbinanya PPID Pembantu di setiap OPD.

d. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, Kemtiraan dan Komunitas

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk. Melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mampu menyediakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) guna memberikan informasi kepada masyarakat serta menyediakan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

Program Aplikasi Informatika, kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Aplikasi Informatika. Program ini merupakan Program Pendukung Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Pada program ini terdapat beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah SPBE yang dikelola. Melalui kegiatan ini diharapkan terkelolanya SPBE sehingga dapat memperlancar urusan pemerintah daerah.

b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Jumlah Aplikasi yang dikembangkan. Melalui kegiatan ini diharapkan akan tersedianya Sistem Aplikasi yang selalu berkembang sehingga memudahkan dalam melakukan pengelolaan data lingkungan pemerintahan Kabupaten Merangin maupun dalam rangka memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat.

c. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Jumlah Smart City yang dikelola. Melalui kegiatan ini diharapkan akan tersedianya sarana dan prasarana berbasis teknologi dan fasilitas-fasilitas berbasis teknologi ditempat-tempat umum sehingga akan memudahkan masyarakat dalam menerima dan memberikan informasi.

d. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Jumlah Menara Telekomunikasi yang diawasi. Melalui kegiatan ini diharapkan akan terpeliharanya beberapa menara telekomunikasi di titik blank spot.

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Data Sektoral Tersedia. Program ini merupakan Program Pendukung Pencapaian Visi dan Misi Kepala

Daerah. Pada program ini terdapat beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Statistik Sektoral yang disusun. Melalui kegiatan ini diharapkan akan tersedianya dokumen statistik sektoral tentang data pembangunan daerah kabupaten Merangin.

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

Program Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah. Program ini merupakan Program Pendukung Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Pada program ini terdapat beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Layanan Keamanan Informasi yang dikelola. Melalui kegiatan ini diharapkan terkelolanya layanan keamanan informasi yang mampu memberikan keamanan dan melindungi data-data yang ada pada perangkat daerah dari ancaman pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

B. PROGRAM PENUNJANG

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota adalah Cakupan pelayanan administrasi perkantoran. Melalui program ini diharapkan terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

dengan baik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin. Pada program ini terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Meubel
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- D. Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Merangin

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

| Kode | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 2 | <i>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</i> | | | | | | | | | |
| 2.16 | <i>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</i> | | | | | | | | | |
| 2.16.01 | <i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</i> | <i>Nilai Evaluasi Akip SKPD Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan</i> | <i>98 % BB Nilai</i> | <i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i> | <i>98 % BB Nilai</i> | <i>3.692.283.003</i> | <i>APBD</i> | | <i>98 % BB Niali</i> | <i>3.866.128.663</i> |
| 2.16.01.2.01 | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | <i>Nilai AKIP</i> | <i>77 (BB) %</i> | <i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i> | <i>72 % BB</i> | <i>42.500.000</i> | <i>APBD</i> | | <i>75 % BB</i> | <i>46.500.000</i> |
| 2.16.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2 Dok | 7.500.000 | APBD | | 1 Dok | 6.500.000 |
| 2.16.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 Dokumen | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 Dok | 5.500.000 | APBD | | 1 Dok | 7.500.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|------------------|---|-------------|--------------|----------------------|-------------|--|-------------|--------------|----------------------|
| 2.16.01.2.01.0 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 Dokumen | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 | Dok | 5.500.000 | APBD | | 1 | Dok | 6.500.000 |
| 2.16.01.2.01.0 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD | 4 Dokumen | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 | Dok | 5.500.000 | APBD | | 1 | Dok | 7.500.000 |
| 2.16.01.2.01.0 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD | 3 Dokumen | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 | Dok | 5.500.000 | APBD | | 1 | Dok | 5.500.000 |
| 2.16.01.2.01.0 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2 | Dok | 7.500.000 | APBD | | 3 | Dok | 7.500.000 |
| 2.16.01.2.01.0 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Laporan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2 | Dok | 5.500.000 | APBD | | 2 | Dok | 5.500.000 |
| 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Nilai AKIP | 77 % (BB) | Dinas Komunikasi dan Informatika | 72 % | BB | 3.036.500.003 | APBD | | 75 % | BB | 3.042.500.663 |
| 2.16.01.2.02.0 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 108 Orang/ Bulan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 27 | Orang/ Bulan | 2.764.088.503 | APBD | | 27 | Orang/ Bulan | 2.770.089.163 |
| 2.16.01.2.02.0 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 16 Dokumen | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 | Dokumen | 240.911.500 | APBD | | 4 | Dokumen | 240.911.500 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------------|---|----------------|----------------------|-------------|--|----------------|----------------------|
| 2.16.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 6 Dokumen | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 Dok | 10.500.000 | APBD | | 2 Dok | 10.500.000 |
| 2.16.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 8 Laporan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 Laporan | 11.000.000 | APBD | | 2 Laporan | 11.000.000 |
| 2.16.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 Laporan | 10.000.000 | APBD | | 4 Laporan | 10.000.000 |
| 2.16.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Nilai AKIP | 77 % (BB) | Dinas Komunikasi dan Informatika | 72 % BB | 3.036.500.003 | APBD | | 75 % BB | 3.042.500.663 |
| 2.16.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 3 Dokumen | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 Dok | 5.500.000 | APBD | | 1 Dok | 5.500.000 |
| 2.16.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 6 Laporan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2 Laporan | 5.500.000 | APBD | | 2 Laporan | 5.500.000 |
| 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan | 96 % | Dinas Komunikasi dan Informatika | 94 % | 47.500.000 | APBD | | 94 % | 51.345.000 |
| 2.16.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 156 Paket | Dinas Komunikasi dan Informatika | 52 Paket | 31.200.000 | APBD | | 52 Paket | 31.200.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|-------------|---|-------------|--------------------|-------------|--|-------------|--------------------|
| 2.16.01.2.05.011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 7 Orang | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 Orang | 16.300.000 | APBD | | 2 Orang | 20.145.000 |
| 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan | 96 % | Dinas Komunikasi dan Informatika | 94 % | 220.500.000 | APBD | | 94 % | 240.500.000 |
| 2.16.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 16 Paket | Dinas Komunikasi dan Informatika | 8 Paket | 5.000.000 | APBD | | 4 Paket | 5.000.000 |
| 2.16.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perleengkapan Kantor | Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perleengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | Dinas Komunikasi dan Informatika | 10 Paket | 7.500.000 | APBD | | 4 Paket | 7.500.000 |
| 2.16.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 18 Paket | Dinas Komunikasi dan Informatika | 6 Paket | 33.500.000 | APBD | | 5 Paket | 33.500.000 |
| 2.16.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 19 Paket | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 Paket | 9.500.000 | APBD | | 4 Paket | 9.500.000 |
| 2.16.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 26 Laporan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 12 Laporan | 165.000.000 | APBD | | 6 Laporan | 185.000.000 |
| 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan | 96 % | Dinas Komunikasi dan Informatika | 94 % | 140.000.000 | APBD | | 94 % | 280.000.000 |
| 2.16.01.2.07.05 | Pengadaan Meubel | Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan | 8 Unit | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 Unit | 40.000.000 | APBD | | 0 Unit | - |
| 2.16.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan Dinas atau Jabatan yang diadakan | 10 unit | Dinas Komunikasi dan Informatika | 3 Unit | 40.000.0000 | APBD | | 1 Unit | 260.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-------------|---|-----------|----------|--------------------|-------------|--|-----------|----------|--------------------|
| 2.16.01.2.07.0 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | 2 Unit | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 | Unit | 30.000.000 | APBD | | 0 | - | - |
| 2.16.01.2.07.0 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan | 8 Unit | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2 | Unit | 30.000.000 | APBD | | 1 | Unit | 20.000.000 |
| 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan | 96 % | Dinas Komunikasi dan Informatika | 94 | % | 66.283.000 | APBD | | 94 | % | 66.283.000 |
| 2.16.01.2.08.0 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 Laporan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 12 | Laporan | 45.700.000 | APBD | | 12 | Laporan | 45.700.000 |
| 2.16.01.2.08.0 4 | Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 1 Laporan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 | Laporan | 20.583.000 | APBD | | 1 | Laporan | 20.583.000 |
| 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan | 96 % | Dinas Komunikasi dan Informatika | 94 | % | 128.000.000 | APBD | | 94 | % | 128.000.000 |
| 2.16.01.2.09.0 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 6 Unit | Dinas Komunikasi dan Informatika | 6 | Unit | 67.500.000 | APBD | | 6 | Unit | 67.500.000 |
| 2.16.01.2.09.0 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 6 Unit | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 | Unit | 35.000.000 | APBD | | 6 | Unit | 35.000.000 |
| 2.16.01.2.09.0 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 12 Unit | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 | Unit | 25.000.000 | APBD | | 12 | Unit | 25.500.000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------|----------------------------------|-----------|---------------|------|--------|---------------|
| 2.16.02 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase layanan Komunikasi Publik | 87 % | Dinas Komunikasi dan Informatika | 87 % | 3.103.834.000 | APBD | 87 % | 3.259.026.435 |
| 2.16.02.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan | Persentase Infomasi dan Komunikasi Publik yang dikelola | 93 % | Dinas Komunikasi dan Informatika | 87 % | 3.103.834.000 | APBD | 87 % | 3.259.026.435 |
| 2.16.02.2.01.04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 21 Dokumen | Dinas Komunikasi dan Informatika | 5 Dok | 105.000.375 | APBD | 5 Dok | 115.000.375 |
| 2.16.02.2.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 12 Dokumen | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2 Dokumen | 2.814.208.625 | APBD | 2 Dok | 2.939.399.625 |
| 2.16.02.2.01.06 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 35 Dokumen | Dinas Komunikasi dan Informatika | 10 Dok | 69.125.700 | APBD | 10 Dok | 79.125.700 |
| 2.16.02.2.01.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media, dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program Atau Kebijakan | 24 Dokumen | Dinas Komunikasi dan Informatika | 5 Dok | 115.500.000 | APBD | 5 Dok | 125.500.735 |
| 2.16.03 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Pemenuhan Unsu-unsur SPBE | 25 % | | 25 % | 3.991.573.250 | | 25 % | 4.243.651.913 |
| 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan E-Government | 92 % | Dinas Komunikasi dan Informatika | 87 % | 3.991.573.250 | | 89 % | 4.243.651.913 |
| 2.16.03.2.02.01 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan | 5 Dokumen | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 Dok | 550.000.000 | APBD | 1 Dok | 568.399.663 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------|--|-------------|--------------------|
| | | Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.16.03.2.02.07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektornik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektornik | 13 Unit | Dinas Komunikasi dan Informatika | 3 Unit | 2.771.921.337 | APBD | | 3 Unit | 2.985.600.337 |
| 2.16.03.2.02.09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City | 10 Dokumen | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2 Dok | 500.000.000 | APBD | | 2 Dok | 500.000.000 |
| 2.16.03.2.02.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 2 Dokumen | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2 DOK | 169.651.913 | APBD | | 1 Dok | 189.651.913 |
| 2.20 | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik | | | | | 100.140.000 | | | | 155.147.000 |
| 2.20.02 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase Data Sektoral Tersedia | 50 % | Dinas Komunikasi dan Informatika | 50 % | 100.140.000 | APBD | | 50 % | 155.147.000 |
| 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Data Sektoral Tersedia | 50 % | Dinas Komunikasi dan Informatika | 50 % | 100.140.000 | APBD | | 50 % | 155.147.000 |
| 2.20.02.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 4 Dokumen | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 Dokumen | 100.140.000 | APBD | | 1 Dokumen | 155.147.000 |
| 2.21 | Urusan Pemerintah Bidang Persandian | | | | | 97.150.000 | | | | 102.000.500 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--|--|--------------|--------------------|
| 2.21.02 | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | 3 OPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | 3 OPD | 97.150.000 | | | 3 OPD | 102.000.500 |
| 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah | 60 % | Dinas Komunikasi dan Informatika | 50 % | 97.150.000 | | | 55 % | 102.000.500 |
| 2.21.02.2.01.01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan informasi dan jarring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan informasi dan jarring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditetapkan | 4 Dokumen | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 Dokt | 97.150.000 | | | 1 Dok | 102.000.500 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

4.1 Indikator Kinerja

Adapun indikator kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada RPJMD Perubahan Kabupaten Merangin tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Layanan Komunikasi Publik dengan target pada tahun 2023 sebesar 70%.
2. Persentase Pengelolaan Aplikasi informatika dengan target pada tahun 2023 sebesar 10%.
3. Persentase Data Sektoral Tersedia dengan target pada tahun 2023 sebesar 25%.
4. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah target pada tahun 2023 sebesar 10%.

4.2 Lokasi Kegiatan, Kebutuhan Dana Indikatif dan Sumber Dana

Secara rinci lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif serta sumber dana kegiatan pada tahun 2024 tampak pada tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Merangin

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

| Kode | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan/S ub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|-----------------|--|--|---|---------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 2 | <i>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</i> | | | | | | | | |
| 2.16 | <i>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</i> | | | | | | | | |
| 2.16.01 | <i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</i> | <i>Nilai Evaluasi Akip SKPD Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan</i> | <i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i> | <i>98 % BB Nilai</i> | <i>3.692.283.003</i> | <i>APBD</i> | | <i>98 % BB Niali</i> | <i>3.866.128.663</i> |
| 2.16.01.2.01 | <i>Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | <i>Nilai AKIP</i> | <i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i> | <i>72 % BB</i> | <i>42.500.000</i> | <i>APBD</i> | | <i>75 % BB</i> | <i>46.500.000</i> |
| 2.16.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2 Dok | 7.500.000 | APBD | | 1 Dok | 6.500.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|---|-------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|
| 2.16.01.2.01.0 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 | Dok | 5.500.000 | APBD | 1 | Dok | 7.500.000 |
| 2.16.01.2.01.0 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 | Dok | 5.500.000 | APBD | 1 | Dok | 6.500.000 |
| 2.16.01.2.01.0 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen DPA – SKPD dan Laporan Hasil Kooordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 | Dok | 5.500.000 | APBD | 1 | Dok | 7.500.000 |
| 2.16.01.2.01.0 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 | Dok | 5.500.000 | APBD | 1 | Dok | 5.500.000 |
| 2.16.01.2.01.0 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2 | Dok | 7.500.000 | APBD | 3 | Dok | 7.500.000 |
| 2.16.01.2.01.0 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2 | Dok | 5.500.000 | APBD | 2 | Dok | 5.500.000 |
| 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Nilai AKIP | Dinas Komunikasi dan Informatika | 72 % | BB | 3.036.500.003 | APBD | 75 % | BB | 3.042.500.663 |
| 2.16.01.2.02.0 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas Komunikasi dan Informatika | 27 | Orang/ Bulan | 2.764.088.503. | APBD | 27 | Orang/ Bulan | 2.770.089.163 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|-------------|-----------|----------------------|-------------|--|-------------|-----------|----------------------|
| 2.16.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 | Dokumen | 240.911.500 | APBD | | 4 | Dokumen | 240.911.500 |
| 2.16.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 | Dok | 10.500.000 | APBD | | 2 | Dok | 10.500.000 |
| 2.16.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 | Laporan | 11.000.000 | APBD | | 2 | Laporan | 11.000.000 |
| 2.16.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 | Laporan | 10.000.000 | APBD | | 4 | Laporan | 10.000.000 |
| 2.16.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Nilai AKIP | Dinas Komunikasi dan Informatika | 72 % | BB | 3.036.500.003 | APBD | | 75 % | BB | 3.042.500.663 |
| 2.16.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 | Dok | 5.500.000 | APBD | | 1 | Dok | 5.500.000 |
| 2.16.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2 | Laporan | 5.500.000 | APBD | | 2 | Laporan | 5.500.000 |
| 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 94 % | % | 47.500.000 | APBD | | 94 % | % | 51.345.000 |
| 2.16.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Dinas Komunikasi dan Informatika | 52 | Paket | 31.200.000 | APBD | | 52 | Paket | 31.200.000 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|---|-------------|--------------------|-------------|--|-------------|--------------------|
| 2.16.01.2.05.011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 Orang | 16.300.000 | APBD | | 2 Orang | 20.145.000 |
| 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 94 % | 220.500.000 | APBD | | 94 % | 240.500.000 |
| 2.16.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 8 Paket | 5.000.000 | APBD | | 4 Paket | 5.000.000 |
| 2.16.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 10 Paket | 7.500.000 | APBD | | 4 Paket | 7.500.000 |
| 2.16.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 6 Paket | 33.500.000 | APBD | | 5 Paket | 33.500.000 |
| 2.16.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 Paket | 9.500.000 | APBD | | 4 Paket | 9.500.000 |
| 2.16.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | 12 Laporan | 165.000.000 | APBD | | 6 Laporan | 185.000.000 |
| 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 94 % | 140.000.000 | APBD | | 94 % | 280.000.000 |
| 2.16.01.2.07.05 | Pengadaan Meubel | Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 Unit | 40.000.000 | APBD | | 0 Unit | - |
| 2.16.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan Dinas atau Jabatan yang diadakan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 3 Unit | 40.000.000 | APBD | | 1 Unit | 260.000.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|-----------|----------|--------------------|-------------|-----------|----------|--------------------|
| 2.16.01.2.07.0 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 | Unit | 30.000.000 | APBD | 0 | - | - |
| 2.16.01.2.07.0 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2 | Unit | 30.000.000 | APBD | 1 | Unit | 20.000.000 |
| 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 94 | % | 66.283.000 | APBD | 94 | % | 66.283.000 |
| 2.16.01.2.08.0 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 12 | Laporan | 45.700.000 | APBD | 12 | Laporan | 45.700.000 |
| 2.16.01.2.08.0 4 | Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 | Laporan | 20.583.000 | APBD | 1 | Laporan | 20.583.000 |
| 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 94 | % | 128.000.000 | APBD | 94 | % | 128.000.000 |
| 2.16.01.2.09.0 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Dinas Komunikasi dan Informatika | 6 | Unit | 67.500.000 | APBD | 6 | Unit | 67.500.000 |
| 2.16.01.2.09.0 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 | Unit | 35.000.000 | APBD | 6 | Unit | 35.000.000 |
| 2.16.01.2.09.0 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 | Unit | 25.000.000 | APBD | 12 | Unit | 25.500.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|----------------------------------|----|---------|---------------|------|--|----|-----|---------------|
| 2.16.02 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase layanan Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | 87 | % | 3.103.834.000 | APBD | | 87 | % | 3.259.026.435 |
| 2.16.02.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintahan | Persentase Infomasi dan Komunikasi Publik yang dikelola | Dinas Komunikasi dan Informatika | 87 | % | 3.103.834.000 | APBD | | 87 | % | 3.259.026.435 |
| 2.16.02.2.01.04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | 5 | Dok | 105.000.375 | APBD | | 5 | Dok | 115.000.375 |
| 2.16.02.2.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2 | Dokumen | 2.814.208.625 | APBD | | 2 | Dok | 2.939.399.625 |
| 2.16.02.2.01.06 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | 10 | Dok | 69.125.700 | APBD | | 10 | Dok | 79.125.700 |
| 2.16.02.2.01.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media, dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program Atau Kebijakan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 5 | Dok | 115.500.000 | APBD | | 5 | Dok | 125.500.735 |
| 2.16.03 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Pemenuhan Unsur-unsur SPBE | | 25 | % | 3.991.573.250 | | | 25 | % | 4.243.651.913 |
| 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan E-Government | Dinas Komunikasi dan Informatika | 87 | % | 3.991.573.250 | | | 89 | % | 4.243.651.913 |
| 2.16.03.2.02.01 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 | Dok | 550.000.000 | APBD | | 1 | Dok | 568.399.663 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|----------------------------------|-----------|----------|--------------------|------|-----------|----------|--------------------|
| | | Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.16.03.2.02.07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektornik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektornik | Dinas Komunikasi dan Informatika | 3 | Unit | 2.771.921.337 | APBD | 3 | Unit | 2.985.600.337 |
| 2.16.03.2.02.09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2 | Dok | 500.000.000 | APBD | 2 | Dok | 500.000.000 |
| 2.16.03.2.02.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2 | DOK | 169.651.913 | APBD | 1 | Dok | 189.651.913 |
| 2.20 | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik | | | | | 100.140.000 | | | | 155.147.000 |
| 2.20.02 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase Data Sektoral Tersedia | Dinas Komunikasi dan Informatika | 50 | % | 100.140.000 | APBD | 50 | % | 155.147.000 |
| 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Data Sektoral Tersedia | Dinas Komunikasi dan Informatika | 50 | % | 100.140.000 | APBD | 50 | % | 155.147.000 |
| 2.20.02.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 | Dokumen | 100.140.000 | APBD | 1 | Dokumen | 155.147.000 |
| 2.21 | Urusan Pemerintah Bidang Persandian | | | | | 97.150.000 | | | | 102.000.500 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|----------------------------------|----------|------------|-----------------------|--|--|-----------|------------|-----------------------|
| 2.21.02 | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Dinas Komunikasi dan Informatika | 3 | OPD | 97.150.000 | | | 3 | OPD | 102.000.500 |
| 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | 50 | % | 97.150.000 | | | 55 | % | 102.000.500 |
| 2.21.02.2.01.01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditetapkan | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 | Dokt | 97.150.000 | | | 1 | Dok | 102.000.500 |
| Total Keseluruhan | | | | | | 10.984.980.953 | | | | | 11.625.961.511 |

BAB V

PENUTUP

a. Catatan penting

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2024 ini sebagai acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin. Oleh sebab itu betapapun sederhananya rencana kerja ini, diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program - program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi yang diharapkan. Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan urusan bidang Komunikasi dan Informatika sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya - upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

disuatu unit kerja serta dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

- b. Kaidah - kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.
- c. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin pada tahun 2024 mendatang akan menetapkan 5 program, 12 kegiatan, dan 40 sub kegiatan. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2024 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas - tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin sudah mencakup semua program pembangunan bidang komunikasi dan informatika sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Bangko, 20 Desember 2023

**KEPALA DINAS
KOMINFO KAB. MERANGIN**



Ir. M. ARIEF RH, MUM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19690626 199303 1 005